

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman, 1987, *Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah*, Jakarta, PT. Melton Putra,
- Ali, Achmad, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana.
- Atmosudirdjo, Prajudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Fauzan, Muhammad, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: UII Press.
- HR, Ridwan, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Pres.
- Hadjon, Philipus M. 1998, *Penataan Hukum Administrasi*, Surabaya, Fakultas Hukum Unair,
- HS, H. Halim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Huda, Ni'matul, 2007, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Indroharto, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pustaka Harapan.
- Kaho, Riwu, 2012, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Yogyakarta, Pol Gov Fisipol UGM.
- Manan, Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Penerbit Pusat Studi Hukum FH UII.
- \_\_\_\_\_, 1994, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta, Pusataka Sinar Harapan.
- Marbun, SF. 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- \_\_\_\_\_, 1982, *DPR Daerah, Pertumbuhan, Masalah, dan Masa depannya*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- ND, Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**Efektivitas Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kota Medan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Setelah Berlakunya UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah**  
RAHMANSYAH F AL K, Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.K.n

Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2002, *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Jakarta, Sinar Mulia.

Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, 2012. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa.

Rohman, Arif dan Teguh Wiyono. 2010. *Education Policy in Decentralization Era*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Irawan Soejito, 1990, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta, Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung, CV. Ramadja Karya.

\_\_\_\_\_. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Sumardjono, Maria SW, 2014, “Metodologi Penelitian Ilmu Hukum”, *Bahan Kuliah*, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Suratman dan H. Philip Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung.

Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

## **B. Artikel Jurnal**

Muin, Fatkhul, Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1 Januari-Maret 2015.

Sendhikasari. Dewi, 2016. “Peralihan Kewenangan Manajemen Pendidikan Menengah dari Kabupaten/Kota ke Provinsi”. *Majalah Info Singkat*, April. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Syafaat, Muhammad Ali, 2017, Konstitusionalitas Peralihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah Dari Kabupaten/Kota Ke Provinsi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2 Juni.

Syafrudin, Ateng, 2000, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan.

## **C. Tugas Akhir/Laporan Penelitian**



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**Efektivitas Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kota Medan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Setelah Berlakunya UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah**  
RAHMANSYAH F AL K, Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.K.n

Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Ernadi, Dedy, Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Jenjang Pendidikan Sma Sederajat Dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota Kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung.

Indah Sari, Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan Kepada Pemerintah Provinsi, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian

Tugas Unit pelaksana teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara